DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Candra, Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Erdianti, Ratri Novita. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: UMM Press.

Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gosita, Arif. (2009**).** *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Respublika. *(Digunakan sebagai landasan teori Viktimologi dan perlindungan hak-hak korban).*

Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Huraerah, Abu. 2018. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.

Hadisuprapto, Paulus. (1996). *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Krisna, Liza Agnesta. (2016). *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetodjo, Wagiati. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum merupakan edisi yang paling banyak digunakan saat ini dan diterbitkan oleh Sinar Grafika.

B. Jurnal/ Skripsi/ Karya tulis ilmiah

Ahmad, Muharram Hafiz, dkk. (2024). "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial TikTok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3.

Aqillasalsabila, Sufi. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Anak Melalui Live TikTok Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah (Analisis Putusan PN Medan No. 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn). *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Harahap, Siti Hajar. (2024). *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial"*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 396–408.

Larasati, Ayu, dan Slamet Tri Wahyudi. "Criminal Policy on Prevention of Child Exploitation in the Form of Donation Requests through the TikTok Platform." *Law Development Journal*, 2025.

Muhammad, A. N., dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi di Kota Balikpapan." *Lex Suprema, Vol. 6, No. 1*, 2024.

Rachmalia, A. P., dkk. (2024). *"Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan"*. UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, hlm. 8457–8462.

Rizqi, Fihra. (2023). *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital"*. Das Sollen, Vol. 1, No. 2, hlm. 1–25.

Sari, Cucun Cundaya Fitria, dan Yuda Pratama. "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital TikTok." *Risalah Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2024, hlm. 91-101.

Simare Mare, Chandra P., July Esther, dan Debora. "Law Enforcement Against Perpetrators of Child Exploitation Through TikTok Social Media for Economic Gain." *Journal of Legal and Cultural Analytics, Vol. 4, No. 1*, 2025.

Sihombing, Mhd. Felix Alghifari. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial TikTok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Zafika, Nurul, dan Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial TikTok." *Pagaruyuang Law Journal*, 2025.

C. Laporan dan Dokumen Resmi

Kepolisian Resor Kota Besar Medan**.** *Laporan Tahunan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan* (khususnya data Penanganan Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak / PPA).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI & Data Kasus Kluster Anak Korban Cybercrime dan Eksploitasi Digital*.

Pementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. Profil Anak Indonesia 2024. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2025. Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2026. Laporan Akhir Tahun 2024: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2025. Laporan Tahunan 2024 UNICEF Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2024. Capaian untuk Anak-Anak Indonesia di Tahun 2024. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia**.** *Laporan Riset Risiko Kejahatan Siber dan Eksploitasi Seksual Anak Secara Online (OCSEA) di Indonesia*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2022. Modul Literasi Digital: Cakap Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. Pedoman Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

D.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

E. Wawancara

Wawancara Dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Dilaksanakan Di Polrestabes Medan, Selasa 14 Juli 2026

Wawancara Dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Dilaksanakan Di Rumah Perlindungan Sosial, Selasa 7 Juli